



PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

MUBA MAJU
Lebih CEPAT

RINGKASAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

(LPPD)

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN 2025



H. M. TOHA TOHET, S.H.

BUPATI MUSI BANYUASIN



ROHMAN

WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Ridho-Nya Tim Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga dalam waktu yang ditentukan dapat disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Penyampaian Ringkasan LPPD kepada masyarakat merupakan bukti akuntabilitas dan keseriusan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan secara terukur dan berkesinambungan. Semoga Ringkasan LPPD ini menjadi ukuran capaian kegiatan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2025. Akhirnya, kami mohon kiranya Masyarakat Musi Banyuasin pada umumnya untuk berkenan memberikan masukan dan saran terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sehingga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.



Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No .	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Indeks Pembangunan Manusi	72,27	73,17
2.	Angka Kemiskinan (%)	12,88	9,97
3.	Angka Pengangguran (%)	2,13	2,04
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,94*	5,11**
5.	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	142,14*	150,06**
6.	Ketimpangan pendapatan	0,314	0,208

Keterangan :

* : Data sementara

** : Data sangat sementara

Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2026



2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja makro yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib terkait pelayanan dasar mencakup urusan pemerintahan sebagai berikut :

1). Urusan Pendidikan

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2025 berdasarkan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	37,24 %
2.	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,75 %
3.	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,22 %
4.	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	75,00 %
5.	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	60,61 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba, 2026

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar **Rp.1.004.601.364.281** dengan Program sebagai berikut :



No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	786.434.529.336	715.144.742.157	91%
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	203.147.500.620	176.378.594.286	87%
3.	Program Pengembangan Kebudayaan	5.203.242.825	5.111.715.158	98%
4	Program Pembinaan Sejarah	343.150.000	342.635.650	100%
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar budaya	286.397.500	278.225.521	97%
6	Program Pengelolaan Permuseuman	415.351.000	412.072.000	99%
7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.771.193.000	8.769.754.965	100%
	Total	1.004.601.364.281	906.437.739.737	90%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba, 2026

C. Permasalahan yang dihadapi

Tidak ada permasalahan dan telah mencapai target/sisa dari tender

2). Urusan Kesehatan

Capaian kinerja urusan Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2025 berdasarkan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :



A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Persentase kematian ibu	0,11 %
2.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	0,65 %
3.	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	81,50 %
4.	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	92,50 %
5.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	96,24 %
6.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	99,82 %
7.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	99,61 %
8.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	99,44 %
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,09 %
10.	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	99,96 %
11.	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	99,96 %
12.	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100 %
13.	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100 %
14.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Muba, 2026



B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp. 391.562.387.897,- dengan Program sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Rp. 301.060.402.255	Rp.282.194.189.557	93,7
2.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 116.905.131.538	Rp.107.996.278.499	92,4
3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rp. 1.266.478.000	Rp. 916.165.571	72,3
4.	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Rp. 388.992.996	Rp. 270.823.599	69,6
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 195.267.040	Rp. 184.930.671	94,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Muba, 2026

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Adanya efisiensi anggaran
2. Transport Perjalanan Dinas Kegiatan berdasarkan Literisasi sedangkan Anggaran pada SIPD masih berupa transport perorang, sehingga terdapat silpa anggaran pada setiap Perjalanan Dinas.

3). Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Musi Banyuasin



pada Tahun 2025 berdasarkan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	68,76%
2.	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	60,31%
3.	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	97,10%
4.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84,20%
5.	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	1,90%
6.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Secara Geografis Kabupaten Musi Banyuasin tidak ada pantai
7.	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100%
8.	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100%
9.	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	89,36%
10.	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	85,71%

Sumber : Dinas PU dan PR Kab. Muba, 2026
Dinas Perkim Kab. Muba, 2026



B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a). Dinas PU dan PR

Realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp. 507.051.266.096,79 dengan Program sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	38.559.402.997,89	31.138.042.448,00	80,75
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	33.654.797.475,00	30.161.582.786,00	89,62
3.	Program Penyelenggaraan Jalan	494.492.839.260,71	416.952.389.981,79	84,32
4.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	550.000.000,00	1.520.000,00	0,28
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.927.507.650,00	5.491.888.476,00	92,65
6.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	26.027.592.200,00	23.279.609.076,00	89,44
	Total	599.212.139.583,60	507.025.032.767,79	84,62

Sumber : Dinas PU dan PR Kab. Muba, 2026

b). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp. 150.090.876.535,00 dengan Program sebagai berikut :



No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	18.206.988.000	15.808.684.050	86,83
2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	19.926.238.650	19.681.243.564	98,77
3.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	26.580.681.410	24.898.458.900	93,67
4.	Program penataan bangunan gedung	96.933.234.963	88.189.849.490	90,98
5.	Program penataan bangunan dan lingkungannya	1.636.001.800	1.512.640.531	92,46
	Total	163.283.144.823	150.090.876.535	92,54

Sumber : Dinas Perkim Kab. Muba, 2026

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Adanya efisiensi anggaran
2. Masalah tata kelola dan kelembagaan dimana lemahnya koordinasi antar instansi (perkim, pdam, dinas kesehatan dan bappeda).
3. Hambatan infrastruktur dan geografis dimana ketimpangan wilayah terdapat tantangan besar dalam menyediakan akses di wilayah kumuh perkotaan maupun daerah pedesaan yang sulit dijangkau jaringan perpipaan.
4. Tantangan demografi dan lingkungan dimana pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan permintaan air bersih sementara pembangunan yang tidak terkontrol mengurangi daerah resapan air.
5. serta masalah sosial dan partisipasi masyarakat dimana masyarakat masih enggan membayar biaya penyambungan atau layanan yang berdampak pada rendahnya utilitas dan berkelanjutan infrastruktur yang telah dibangun.



6. Ketergantungan pada tangki septik individual yang tidak standart, sebagian besar rumah tangga masih menggunakan tangki septik individual yang sering kali tidak kedap air atau tidak disedot secara rutin, hal ini menyebabkan kebocoran limbah ke tanah dan mencemari sumber air tanah.
7. Terbatasnya infrastruktur pengelolaan limbah terpusat, capaian sanitasi aman sangat bergantung pada sistem perpipaan pembuangan air limbah dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) hingga saat ini sistem ini belum menjangkau banyak wilayah.
8. Masalah sosial -budaya dan perilaku (praktiks BABS dan kesadaran penyedotan yang masih rendah, karena banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tanki septik harus disedot secara berkala minimal 3-5 taun sekali agar masuk katagori sanitasi aman.

4). Urusan Permukiman Rakyat

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan Permukiman Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2025 berdasarkan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	0 %
2.	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	0,83
3.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	1,80 %
4.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0 %

Sumber : Dinas Perkim Kab. Muba, 2026



B. Realisasi Belanja Urusan Permukiman Rakyat

Realisasi belanja urusan Permukiman Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp.105.523.203.500 dengan Program sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1.	Program pengembangan perumahan	11.405.988.800	10.771.686.050	94,44
2.	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	25.934.904.000	25.805.050.000	99,50
3.	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	70.645.251.607	68.946.467.450	97,60
	Total.....	107.986.144.407	105.523.203.500	97,18

Sumber : Dinas Perkim Kab. Muba, 2026

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Permukiman Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Adanya efisiensi anggaran
2. kesenjangan anggaran dan sumber daya, dimana keterbatasan anggaran dibandingkan dengan tingginya jumlah rumah tidak layak huni yang harus ditangani.
3. serta masalah sosial -ekonomi masyarakat, dimana persyaratan administrasi program bantuan seringkali terhambat oleh masalah kepemilikan lahan yang sah (legalitas tanah) oleh calon penerima.



5). Urusan Trantibumlinmas

A. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2025 berdasarkan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100 %
2.	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100 %
3.	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100%
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,42%
5.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	69,49 %

Sumber : BPBD Kab. Muba, 2026

Satuan Polisi Pamong Praja, 2026

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas

Realisasi belanja urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp. 13.682.838.446 dengan Program sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.625.459.710	1.312.193.046	80,73



No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
2.	Program Penanggulangan Bencana	12.310.264.108	7.661.279.898	62,23
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	4.948.931.000	4.709.365.502	95,16
	Total	18.884.654.818	13,682,838,446	72,45

Sumber : BPBD Kab. Muba, 2026

Satuan Polisi Pamong Praja, 2026

C. Permasalahan yang dihadapi

Tidak ada Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Musi Banyuasin.

6). Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2025 berdasarkan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%



No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
5.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100%
6.	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	11,62%

Sumber : Dinas Sosial Kab. Muba, 2026

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan Permukiman Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebesar Rp. 2.430.918.000,- dengan Program sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	Program Rehabilitasi Sosial	1.471.563.000,-	1.328.206.846,-	90,26
2	Program Penanganan Bencana	959.355.000,-	895.356.961,-	93,33
	Total	2.430.918.000,-	2.223.563.807,-	91,47

Sumber : Dinas Sosial Kab. Muba, 2026

C. Permasalahan yang dihadapi

1. Jumlah pekerja sosial (Peksos) profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti kurangnya armada transportasi khusus untuk evakuasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta belum optimalnya fasilitas rumah singgah yang sesuai standard;



3. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM belum sepenuhnya mencukupi untuk menjangkau seluruh sasaran pelayanan minimal.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun sebelumnya
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2023 mendapatkan skor 3,0191 dengan status Kinerja Sedang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023. Sedangkan hasil penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2024 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 mendapatkan Opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 43.A/LHP/XVIII.PLG/05/ 2025 tanggal 25 Mei 2023.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin Unaudited Tahun 2025 mencapai sebesar Rp 3.968.164.168.909,51 dan realisasi belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 mencapai Rp 3.871.323.652.344,79.

Secara rinci, rincian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :



Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4.1.01	Pajak Daerah	223.975.016.750,00	221.828.935.874,35	99,04
4.1.02	Retribusi Daerah	5.660.787.000,00	9.914.556.645,00	175,14
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	18.395.564.057,62	61,31
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	327.742.877.358,99	311.812.260.408,11	95,13
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.505.400.983.500,00	3.233.090.228.896,00	92,23
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.590.148.166,60	173.122.623.028,43	87,61
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		4.290.369.812.775,59	3.968.164.168.909,51	92,49

Sumber : BPKAD Kab. Muba, 2026



Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.605.850.647.744,57	1.459.380.047.538,22	90,87
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.979.321.942,31	834.895.714.186,19	85,28
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	262.798.375.249,00	246.484.811.969,92	93,79
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	78.068.692.000,00	56.468.348.310,00	72,33
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.996.785.750,00	1.150.484.130,00	57,61
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.723.099.390,28	108.116.548.508,58	94,24
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.207.215.860,00	123.976.665.935,08	87,79
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	558.908.666.183,89	488.599.757.196,80	87,42
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.116.469.853,00	21.054.567.424,00	99,70
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	96.393.177,00	79.228.870,00	82,19
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.442.284.504,55	2.766.488.804,00	50,83
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	544.652.123.254,00	528.350.989.472,00	97,00
JUMLAH BELANJA		4.313.840.074.908,60	3.871.323.652.344,79	89,74

Sumber :BPKAD Kab. Muba, 2026



5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 000.7.2/340.A/KPTS-BAPPEDA/2025 Tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

NO.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan Pendirian Paud (Pendidikan Anak Usia Dini) dengan Penerapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin	Sistem perizinan yang lebih terstruktur, efisien, dan transparan bagi pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Akselerasi Akreditasi Sekolah di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	Bertujuan mendorong seluruh sekolah agar memenuhi kelayakan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan: dari kompetensi lulusan hingga standar pembiayaan. Pendekatannya dilakukan secara sistematis melalui pembentukan Tim Pemantau Akreditasi, sosialisasi bersama Badan Akreditasi Nasional, pelatihan teknis bagi sekolah sasaran, serta



NO.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			pendampingan intensif selama proses persiapan dan penilaian
		Meningkatkan Efektivitas Kearsipan Melalui Google Drive pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin	Latar belakang terciptanya inovasi adalah tumpukan dokumen fisik yang tidak tertata, sulitnya pencarian dokumen penting, minimnya ruang penyimpanan, dan kerentanan terhadap kerusakan atau kehilangan arsip.
		Peningkatan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Melalui Optimalisasi Sistem Pelayanan Akreditasi pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin	Optimalisasi Sistem Pelayanan Akreditasi
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Musi Banyuasin Melalui Aplikasi Electronic-Pajak Air Tanah (e-PAT)	Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah
3	Dinas Perkebunan	Berkebun Gratis dan Praktis (Buntis) Strategi Peningkatan Produktivitas Komoditi Unggulan	Terobosan inovatif dalam menjawab tantangan rendahnya produktivitas dan keterbatasan akses pekebun terhadap sarana prasarana perkebunan yang berkelanjutan



NO.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peluk Jauh	Pelayanan Telusur Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Berkebutuhan Khusus
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Muba Survei Solusi Validasi Data	Strategi Walidata Dalam Percepatan Pendataan Data Tematik Statistik Sektoral Melalui Muba Survei Untuk Terwujudnya Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SIPETOM	Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pendataan dan Monitoring Masyarakat
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	“GERCEP PASTI MUBA” Strategi Gerak Cepat Penanganan Jalan Strategis di Kabupaten Musi Banyuasin	Upaya percepatan penanganan jalan strategis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur jalan
		Pintar dengan Web Gis (Geographic Information System)	Peningkatan Kinerja Pelayanan Informasi Penataan Ruang melalui Optimalisasi Web GIS
8	Dinas Sosial	BANTU UMAK	Meningkatkan



NO.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat Untuk Menurunkan Kemiskinan Ekstrim
		Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Stimulan bagi masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni
		Jurasik (Jujur Masyarakat Miskin)	Kegiatan Sosialisasi/ Pelatihan kepada KPM untuk sadar miskin dan tidak miskin
		BEDECIT (Bergerak Dengan Cepat Ikhlas dan Tuntas)	Inovasi yang dibuat dengan ketepatan dan kecepatan waktu dalam membantu korban bencana di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
		Siap Bos (Sistem Informasi Data Penerima Bantuan Sosial)	Sistem informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program penyaluran bantuan sosial sehingga mudah dikontrol, dipantau dan mengurangi penyimpangan.
9	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	Sistem Penyimpanan Perjanjian Kerjasama (SIPERJA)	Aplikasi digital untuk penyimpanan dokumen kerjasama,



NO.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			yang bermanfaat untuk otomatisasi database dokumen kerjasama dan menjadi sistem pengingat masa berlaku perjanjian kerjasama, supaya dapat mengurangi kejadian expired masa berlaku perjanjian kerjasama di RSUD Sekayu
		Sistem Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (Spj) Secara Digital (Si Veri Superjadi)	Pengelolaan keuangan daerah secara elektronik yang transparan dan akuntabel
		"SIFORMALIN" Sistem Informasi Pelayanan Penyuluhan Kesehatan di RSUD Sekayu Berbasis Online	Sistem ini memungkinkan penyuluhan kesehatan dilakukan secara online melalui aplikasi, website, dan WhatsApp Center, sehingga pasien dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja tanpa harus hadir secara fisik di rumah sakit
10	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	SIAROLIN (Sistem Informasi Arsip Online RSUD Sungai Lilin)	Sistem Informasi Arsip Online RSUD Sungai Lilin



NO.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
11	Sekretariat DPRD	SIAP LAPOR MUBA	Strategi Tampung Pengaduan Dan Laporan Masyarakat Kepada Anggota Dprd Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber : BAPPEDA Kab. Muba, 2026